



Berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019

RENJA

RENCANA KERJA

<https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/renja-2021/>



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU**

Jalan Danau Luar No. 01 Telp. (0567) 21359

Website: satpolpp.kapuashulukab.go.id - Email satpolpp@kapuashulukab.go.id

PUTUSSIBAU 78711

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa yang melimpahkan berkat dan rahmat Nya sehingga Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2021 ini dapat tersusun.

Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Penyusunan Renja SKPD ini sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016– 2021 serta Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 – 2021.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun oleh masing-masing SKPD termasuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu.

Demikian Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 disusun dan diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Putussibau, Juli 2020

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU,


RUPINUS, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19691112 199010 1 001

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 LANDASAN HUKUM.....	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	3
1.3.1 Maksud.....	3
1.3.2 Tujuan.....	3
1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN.....	4
BAB II.....	5
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	5
2.1. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	5
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	7
2.3. ISI-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH....	9
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD	10
2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT	19
BAB III	22
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	22
3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL.....	22
3.2 TUJUAN DAN SASARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.....	23
3.3 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2021	25
BAB IV	31
PENUTUP.....	31

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD	6
Tabel 2. 2 Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD	7
Tabel 2. 3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021	11
Tabel 2. 4 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022	19
Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Renja Satpol PP Tahun 2021	24
Tabel 3. 2 Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Target Capaian Kinerja Renja Tahun 2021	27
Tabel 4. 1 Link/ URL Download RENJA dan Dokumen SAKIP	32



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tahun 2021 merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2021.

Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat Pemerintah Daerah mempunyai peran yang strategis dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah Kabupaten Kapuas Hulu khususnya dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan Penegakan Peraturan Daerah serta perlindungan masyarakat. Selanjutnya dalam rangka mendorong terciptanya situasi yang kondusif dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, perlu ditunjang dengan peningkatan sistem pertahanan, keamanan dan ketertiban dengan kebijakan yang diarahkan kepada peningkatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan masalah ketentraman dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, guna mendukung pelaksanaan hal tersebut diatas serta mendukung kelancaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Kapuas Hulu maka sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja yang mana nantinya akan digunakan sebagai pedoman / arahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menunjang pelaksanaan pembangunan jangka menengah (RPJM) Kabupaten Kapuas Hulu.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2021 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010-2014;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor

- 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman penyusunan, pengendalian, dan evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 – 2021.
 17. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 75 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan Program/ Kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran serta, terciptanya efektivitas dan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 adalah:

- a. Terwujudnya penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021;
- b. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar desa, antar sektor, antar wilayah, antar fungsi di semua tingkatan pemerintahan;
- c. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan; dan
- d. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Organisasi Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2021

BAB IV PENUTUP

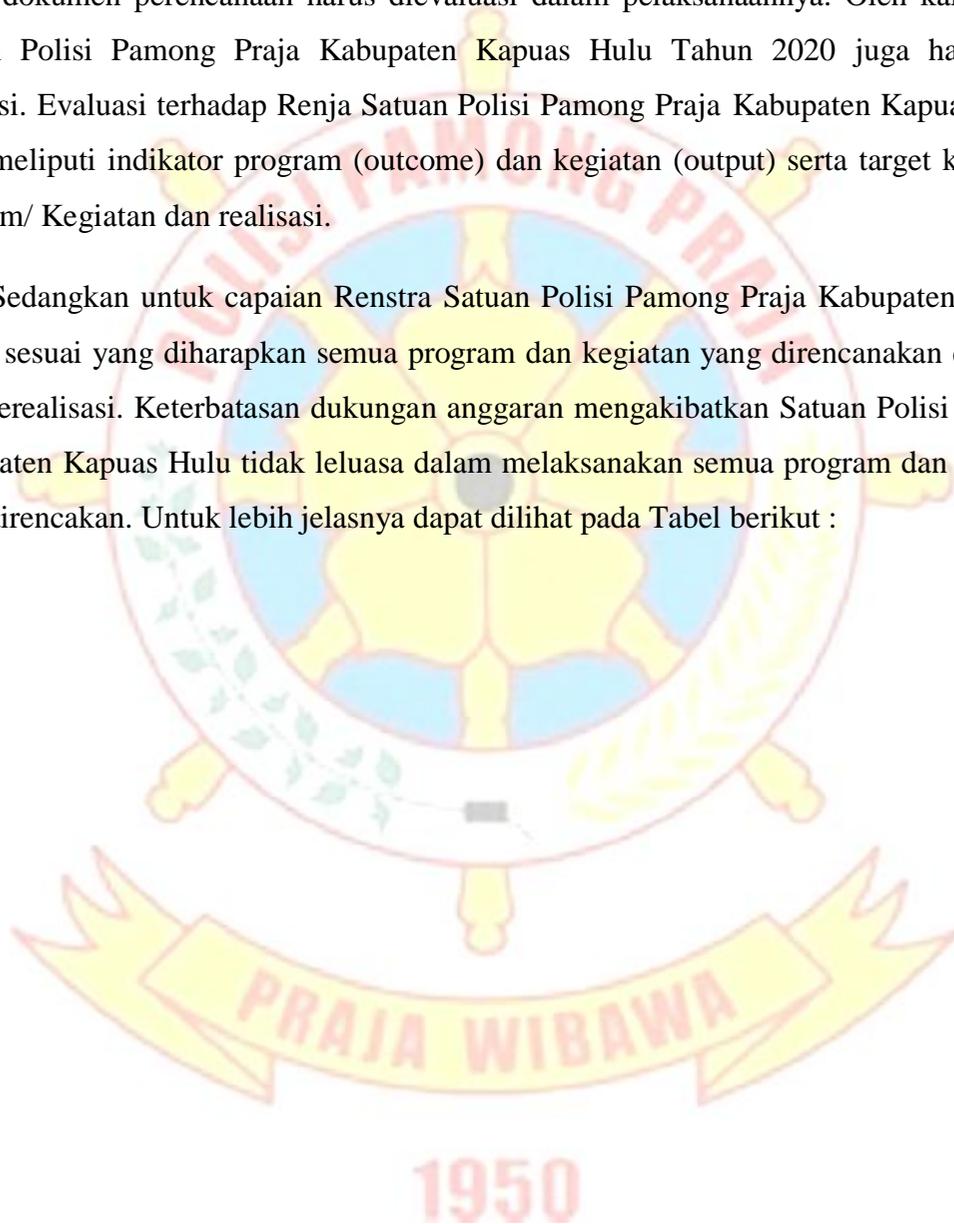
BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 meliputi indikator program (outcome) dan kegiatan (output) serta target kinerja capaian Program/ Kegiatan dan realisasi.

Sedangkan untuk capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu belum sesuai yang diharapkan semua program dan kegiatan yang direncanakan dalam Renstra tidak terealisasi. Keterbatasan dukungan anggaran mengakibatkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu tidak leluasa dalam melaksanakan semua program dan kegiatan yang telah direncanakan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut :



Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	target capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2018	Target dan Realisasi kinerja hasil program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2019			Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun/n-1) 2020	Perkiraan Realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2020 (tahun berjalan/n-1)		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Tingkat capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+(9)*	11=(10/4)*	12
05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat										
01	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95%	98%	95%	98%	103,33	95%	97%	102%	
01	2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95%	100%	95%	100%	105,26	95%	98%	104%
01	2.02	Administrasi Keuangan	Persentase Administrasi Keuangan	95%	99%	95%	98%	103,59	95%	97%	102%
01	2.03	Administrasi Umum	Persentase Administrasi Umum	95%	99%	95%	98%	103,59	95%	97%	102%
01	2.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	95%	101%	95%	101%	106,42	95%	99%	104%
02	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Pelanggaran Perda/ Perkada/ K3	100%	100%	100%	72%	72%	100%	91%	91%	
02	2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3	100%	100%	100%	92%	91,67	100%	97%	97%
02	2.02	Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran Perda dan Perkada	100%	100%	100%	72%	72,00	100%	91%	91%
02	2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	90%	0%	25%	0%	0,00	50%	0%	0%

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Analisis kinerja pelayanan SKPD menggunakan indikator yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dengan sasaran target sesuai dengan Renstra SKPD dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan. Untuk lebih rinci tentang pencapaian dan analisis pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 2 Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD

No	Indikator *)	SPM/ standar	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		nasional	(PP- 6/2008)	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
				(tahun n-2)	(tahun n-1)	(tahun n)	(tahun n+1)	(tahun n-2)	(tahun n-1)	(tahun n)	(tahun n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Predikat SAKIP			B	B	BB	BB	CC	B	BB	BB	
2	Persentase Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	72%	100%	100%	
3	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)			100%	100%	100%	100%	100%	92%	100%	100%	
4	Keberadaan PERDA tentang ketertiban umum		Ada					Ada	Ada	Ada	Ada	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/perda-kebersihan-ketertiban-umum/ https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/perda-ketertiban-umum/
5	Rasio personil SatpoL PP terhadap jumlah penduduk							0,43% per 10.000 penduduk	Personil Satpol PP (PNS) pada Tahun 2019, sebanyak = 43 orang (57-14)÷10000X100%			
6	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)							Ada 8 SOP	Ada 9 SOP	Ada 10 SOP	Ada 11 SOP	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/sop/

7	Jumlah fasilitas / prasarana informasi :						Papan Pengumuman 1 Buah	Papan Pengumuman 1 Buah	Papan Pengumuman 1 Buah	Papan Pengumuman 1 Buah	
							Pos Pengaduan 4 Pos (Pos Penjagaan)	Pos Pengaduan Pelanggaran Perda/ Perkada 1 Pos	Pos Pengaduan Pelanggaran Perda/ Perkada 1 Pos	Pos Pengaduan Pelanggaran Perda/ Perkada 1 Pos	
							Leaflet Tidak ada	Leaflet Ada	Leaflet Ada	Leaflet Ada	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/brosur-leaflet-pelayanan-pengaduan-pelanggaran-perda-perkada/
							Mobil Patroli 1 Buah	Mobil Patroli 1 Buah	Mobil Patroli 1 Buah	Mobil Patroli 1 Buah	
							Mobil PAMWAL 2 Buah	Mobil PAMWAL 2 Buah	Mobil PAMWAL 2 Buah	Mobil PAMWAL 2 Buah	
							Website Tidak Ada	Website Ada	Website Ada	Website Ada	satpolpp.kapuashulukab.go.id
8	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat						Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/download/kuisisioner-pelayanan-pengaduan-pelanggaran-perda-perkada/
9	Persentase Personel Satpol PP berkualitas PPNS						0%	0%	0%	5%	
10	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	100%		0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%

2.3. ISI-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat berdasarkan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam melaksanakan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- b. Pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta penegakkan perundangn-undangan daerah.
- c. Pelaksanaan kordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, perundang-undangan daerah serta perlindungan masyarakat dengan aparat kepolisian negara dan atau lembaga lainnya.
- d. Pengelolaan barang/kekayaan milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya.
- e. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
- f. Penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara periodik.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati Kapuas Hulu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sedangkan Visi Bupati Kapuas Hulu yaitu ***"Menuju Kapuas Hulu yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing dan Harmonis"***

Untuk mewujudkan Visi sebagaimana tersebut diatas, maka misi adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat Tata Kelola Kepemerintahan yang Lebih Baik dan Bersih; dan
2. Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Bertumpu pada Sumber Daya Daerah yang Berkelanjutan.

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu, permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional, tantangan dan peluang

maka ditentukan isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut:

- a. Terorisme sebagai akibat terbukanya akses dari negara Malaysia maupun dari Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara;
- b. Isu Primordialisme, Ras dan Keagamaan;
- c. Kebijakan pemerintah pusat yang mengganggu atau menghambat masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya misalnya penetapan kawasan hutan lindung yang menjadi kewenangan pemerintah pusat berakibat masyarakat dikawasan hutan lindung tersebut tidak dapat mengolah dan mengelola hasil hutan.
- d. Kestabilan suhu politik yang tidak menentu menyebabkan terhambatnya para investor untuk membuka usaha bisnis di Kabupaten Kapuas Hulu.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Rancangan Awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 2. 3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (Berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019)					Cat .
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01						Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95%	4.928.809.835	
2.01						Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95%	10.903.700	
02	Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen yang dikerjakan	2	4.489.200	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen yang dikerjakan	4	6.753.700	
05	-	-	-	-	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Kegiatan Evaluasi	4	4.150.000	
2.02						Administrasi Keuangan		Persentase Administrasi Keuangan	95%	1.567.600.000	
01	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/ Rumah Dinas Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur yang Menerima Tunjangan Khusus	2.688	2.422.200.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur yang menerima Gaji dan Tunjangan	1.512	1.497.600.000	
02	-					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	95%	10.000.000	
03						Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase Peyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	95%	10.000.000	
04						Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	95%	10.000.000	

05						Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase Penyiapan Bahan Tanggapan	95%	10.000.000	
07						Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	2	10.000.000	
08						Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	2	10.000.000	
09						Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan OPD	1	10.000.000	
2.03	Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	95%		Administrasi Umum		Persentase Administrasi Umum	95%	2.163.035.135	
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Materai dan Peranko yang dibeli	1.050	4.625.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Materai dan Peranko yang dibeli	1.050	4.625.000	
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Satuan Polisi Pamong Praja	Pembayaran Telepon, Air dan Listrik	12	40.320.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Satuan Polisi Pamong Praja	Pembayaran Telepon, Air dan Listrik	12	71.320.000	
			Pembayaran Tv Kabel dan Internet	6				Pembayaran Tv Kabel dan Internet	12		
								Jumlah Website yang di kelola/dikembangkan	1		
06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Kendaraan Dinas yang dibayar Pajaknya	8	7.800.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Kendaraan Dinas yang dibayar Pajaknya	8	7.800.000	
07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Satuan Polisi Pamong Praja	Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan	232	100.680.000	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Satuan Polisi Pamong Praja	Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan	238	102.980.000	

09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Peralatan Kerja yang Diperbaiki	27	11.900.000	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Peralatan Kerja yang Diperbaiki	47	21.900.000
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Dibeli	74	87.201.500	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Dibeli	74	87.201.500
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Satuan Polisi Pamong Praja	Dokumen yang dicetak	4	17.404.800	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Satuan Polisi Pamong Praja	Dokumen yang dicetak	4	17.404.800
			Dokumen yang digandakan	11				Dokumen yang digandakan	11	
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Alat-Alat Listrik dan Lampu Penerangan Kantor	11	23.305.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Alat-Alat Listrik dan Lampu Penerangan Kantor	11	23.305.000
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Peralatan Kantor yang Disediakan	6	8.607.500	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Peralatan Kantor yang Disediakan	6	46.145.000
14	-	-	-	-	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	6	15.050.000
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Langganan Koran	5	8.400.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Langganan Koran	5	8.400.000
16						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5	5.000.000
17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Orang yang Disediakan Makanan dan Minumannya	88	222.640.000	Penyediaan Makanan dan Minuman	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Orang yang Disediakan Makanan dan Minumannya	88	199.060.000

18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Ibu Kota Provinsi dan Luar Prov.	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi	6	497.518.000	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Ibu Kota Provinsi dan Luar Prov.	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi	6	569.223.800
								Jumlah Peserta Apel Tingkat Provinsi	17	
								Jumlah Peserta Apel Tingkat Nasional	5	
01.062	Pembuatan dan Pengembangan Website SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Website yang di kelola/dikembangkan	1	29.900.000	-	-	-	-	0
01.066	Penyediaan Jasa Publikasi	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Spanduk yang Disediakan	17	5.100.000	-	-	-	-	0
20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas	3	546.100.000	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas	3	546.100.000
25	Pengadaan Mebeleur	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Pengadaan Mebeulair	9	13.600.000	Pengadaan Mebeleur	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Pengadaan Mebeulair	10	20.150.000
30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah BBM	18.050	233.770.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah BBM	18.050	233.770.035
			Jumlah Penggantian Suku Cadang Kendaraan	46				Jumlah Penggantian Suku Cadang Kendaraan	46	
			Jumlah Kegiatan Servis Kendaraan	25				Jumlah Kegiatan Servis Kendaraan	25	
38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Gedung yang direhabilitasi	1	183.600.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Gedung yang direhabilitasi	1	183.600.000

2.04						Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	95%	1.187.271.000	
02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	200	352.580.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	176	400.200.000	
05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Pengadaan Pakaian Olahraga	100	25.000.000	-	-	-	-	0	
09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Ibu Kota Provinsi dan Luar Prov.	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	59	787.071.000	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Ibu Kota Provinsi dan Luar Prov.	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	59	787.071.000	
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Cakupan penyusunan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	95%		-	-	-	-	0	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen yang dikerjakan	1	2.587.000	-	-	-	-	0	
	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) di SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Dokumen yang dikerjakan	1	11.945.000	-	-	-	-	0	

02						Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Pelanggaran Perda/Perkada/ K3	100%	3.060.982.000	
2.01						Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3	100%	2.878.205.000	
01	Pengawasan Pedagang Kaki Lima	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Kegiatan Pengawasan PKL	3	71.248.000	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Kegiatan Pengawasan PKL	3	1.500.431.000	
	Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Kantrantibmas	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Kegiatan Pengamanan	25	160.593.000			Jumlah Kegiatan Pengamanan	25		
								Jumlah Pegawai Honorer/ Tidak Tetap yang menerima Honorarium	372		
	Pengamanan dan Pengawasan Kunjungan Kerja Pejabat Daerah	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Kegiatan Pengamanan Pengawasan Pejabat Pemda, Provinsi dan Pusat	12	299.400.000			Jumlah Kegiatan Pengamanan Pengawasan Pejabat Pemda, Provinsi dan Pusat	12		
	Pembuatan Peta Rawan Trantibum	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Daerah Rawan Trantibum	23	44.590.000			Jumlah Daerah Rawan Trantibum	23		
						Jumlah Personil Pengamanan (Pos Penjagaan, Dan Pos, Perwira Pengawas, Pamkat VIP dan PTI)	804				
02	Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran PERDA	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Pelanggaran PERDA yang ditindaklanjuti	5	89.289.000	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Pelanggaran K3 yang terselesaikan	100%	103.789.000	
						Jumlah Pelanggaran K3 keseluruhan/ yang dilaporkan					

	Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	20	14.500.000			Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	20	
03	Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah kegiatan koordinasi dan kunjungan kerja	42	313.600.000	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Kegiatan Kunjungan Kerja	23	431.710.000
	Peringatan HUT Polisi Pamong Praja dan Raker Trantibum	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Peserta Apel di Kabupaten	750	117.910.000			Jumlah Peserta Rakor Tingkat Kabupaten	175	
04						Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Kapuas Hulu	Rasio Petugas LINMAS	0,98	206.945.000
	Bantuan Penanganan Bencana dan Kebakaran	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Kejadian Bencana	3	57.300.000			Persentase Penanganan bencana	50%	
	Penyuluhan dan Pembinaan Potensi Masyarakat dalam Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Putussibau	Jumlah Peserta Penyuluhan	80	28.970.000			Jumlah Peserta Pembinaan Potensi Linmas Desa	75	
05	Penyelenggaraan Bimtek Dasar Polisi Pamong Praja	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimtek Dasar Pol PP	100	147.500.000	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimtek Dasar Pol PP	75	322.240.000
	Kesamaptaan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Latihan Bela Diri dan Kesamaptaan	50	16.800.000			Jumlah Aparatur yang Mengikuti Latihan Bela Diri dan Kesamaptaan	50	
	Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Peserta Pelatihan Dalmas	50	15.500.000			Jumlah Peserta Pelatihan Dalmas	45	
	Penyuluhan Anggota Satpol PP Kecamatan	Pts Utara & Pts Selatan	Jumlah Anggota Satpol PP Kecamatan yang mengikuti Kegiatan Penyuluhan	23	54.230.000			Jumlah Anggota Satpol PP Kecamatan yang Mengikuti Kegiatan Penyuluhan	20	
	Pelatihan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat	Kabupaten Kapuas	Jumlah Anggota yang mengikuti Pelatihan	336	88.210.000			Jumlah Anggota yang mengikuti Pelatihan	412	

		Hulu	Linmas					Linmas			
06	Penilaian Kredit Point Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur yang Dinilai Kredit Point Jabatan Fungsional	41	79.490.000	Pembinaan Jabatan Fungsional Satpol Polisi Pamongpra	Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase Jabatan Fungsional Satpol PP	95%	79.490.000	
07	-	-	-	-	-	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Kapuas Hulu/ Provinsi/ Pusat	Jumlah MoU	1	50.000.000	
08	-	-	-	-	-	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana	1	183.600.000	
2.02						Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota		Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran Perda dan Perkada	100%	132.777.000	
01	Penyuluhan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Peserta Penyuluhan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	85	30.546.000	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Peserta Sosialisasi Penegakan Perda dan Perkada	85	30.546.000	
02	Monitoring, Evaluasi dan Identifikasi Pelanggaran Perda	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Pelanggaran Perda yang Termonitor dan Terevaluasi	4	52.231.000	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Pelanggaran Perda yang Termonitor dan Terevaluasi	5	52.231.000	
03	-	-	-	-	0	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Kab. Kapuas Hulu	Persentase Penanganan Pelanggaran Perda dan Perkada	100%	50.000.000	

2.03	-	-	-	-	0	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		Persentase Pembinaan PPNS	90%	50.000.000
01	-	-	-	-	0	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kab. Kapuas Hulu, Provinsi dan Luar Provinsi	Jumlah PPNS yang direkrut	2	50.000.000
TOTAL					7.330.251.000		-			7.989.791.835

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Pada bagian ini dapat kami uraikan mengenai usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan, baik kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, Asosiasi-Asosiasi, perguruan tinggi maupun seluruh SKPD Kabupaten Kapuas Hulu yang mana terdapat beberapa usul terkait peningkatan gangguan keamanan dan trantibum serta perlindungan masyarakat.

Penelaahan/review hasil usulan program dan kegiatan dari masyarakat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 4 Rumusan Rencana Program dan Kejiata SKPD Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022

No	Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1.1	Administrasi Umum				
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satpol PP	Jumlah Peralatan Kantor yang Disediakan	6	
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Satpol PP	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	6	
4	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Luar Daerah Dalam Prov. Dan Luar Prov.	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi	6	

	5	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Satpol PP	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas	3	
	6	Pengadaan Mebeleur	Satpol PP	Jumlah Pengadaan Mebeulair	10	
	7	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Satpol PP	Jumlah Gedung yang direhabilitasi	1	
	8	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Satpol PP	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	176	
2	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Kab. Kapuas Hulu	Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Pelanggaran Perda/ Perkada/ K3	100%	
2.1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Kab. Kapuas Hulu	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3	100%	
	1	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Kegiatan Pengawasan PKL	3	
			Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Kegiatan Pengamanan	25	
			Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Kegiatan Pengamanan Pengawasan Pejabat Pemda, Provinsi dan Pusat	12	
			Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Daerah Rawan Trantibum	23	
	2	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Pelanggaran K3 yang terselesaikan	100%	
				Jumlah Pelanggaran K3 keseluruhan/ yang dilaporkan		
				Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	20	
	3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Kegiatan Kunjungan Kerja	23	
	4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Kapuas Hulu	Rasio Petugas LINMAS	0,98	
				Persentase Penanganan bencana	50%	
			Putussibau	Jumlah Peserta Pembinaan Potensi Linmas Desa	75	
	5	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimtek Dasar Pol PP	75	

	Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Satpol PP	Jumlah Anggota yang mengikuti Pelatihan Linmas	412	
6	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	Jumlah MoU	1	
7	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana	1	
2.2	Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Kab. Kapuas Hulu	Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran Perda dan Perkada	100%	
1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Peserta Sosialisasi Penegakan Perda dan Perkada	85	
2	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Pelanggaran Perda yang Termonitor dan Terevaluasi	5	
3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	Kab. Kapuas Hulu	Persentase Penanganan Pelanggaran Perda dan Perkada	100%	
2.3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Satpol PP	Persentase Pembinaan PPNS	90%	
1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Satpol PP	Jumlah PPNS yang direkrut	2	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjadi titik tolak penyelenggaraan otonomi daerah pada kabupaten/kota. Daerah kabupaten/kota mempunyai kewenangan yang didasarkan pada azas otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, serta azas tugas pembantuan yang merupakan penugasan daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan.

Ini berarti daerah diberikan keleluasan menjalankan pemerintahan dan pembangunannya secara bertanggung jawab dengan melihat kondisi dan potensi lokalnya. Salah satu pertimbangan yang mendasar perlunya diselenggarakan otonomi daerah adalah peningkatan kemandirian pemerintah daerah yang mempunyai implikasi langsung terhadap kemampuan keuangan daerah, sumber daya manusia dan sumber daya alam, dalam menjalankan roda pemerintahan dan kelanjutan pembangunan. Daerah kabupaten/kota adalah ujung tombak pelaksanaan pembangunan, karena daerah-daerah tersebut yang lebih mengetahui kebutuhan dan potensi rakyat didaerahnya. Pada akhirnya dapat meningkatkan *Local accountability* pemerintah terhadap rakyatnya.

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam sejarah penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dapat dikatakan tetap atau selalu eksis tidak berubah. Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok pemerintahan di Daerah, kemudian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, selalu ada pasal tertentu yang menyatakan keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja.

Ini berarti ketika zaman terus berubah, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja tidak berubah, selalu dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal ini mengingat peran strategis Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu

sebagaimana tercantum dalam Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 (pasal 148) : “ Untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja”.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Penetapan tujuan dan sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Berdasarkan pernyataan diatas maka tujuan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 sesuai dengan Renstra adalah :

- a. Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik;
- b. Mantapnya ketentraman dan ketertiban yang mengarah kepada kondisi yang aman dan kondusif;

Adapun sasaran dari Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 adalah :

- a. Meningkatnya Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP ;
- b. Meningkatnya Kondusifitas Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu;

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Renja Satpol PP Tahun 2021

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TAHUN 2021
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik	Meningkatnya Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP	Predikat SAKIP	BB
2	Mantapnya Ketentraman dan Ketertiban yang Mengarah Kepada Kondisi yang Aman dan Kondusif	Meningkatnya Kondusifitas Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu	Persentase Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah	100%
			Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	100%
			Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	100%



3.3 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2021

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di tahun 2021 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu menetapkan 2 program dan 7 Kegiatan dengan 42 Sub Kegiatan.

Sasaran 1: Meningkatnya Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP

Capaian kinerja sasaran diarahkan pada upaya meningkatkan predikat nilai evaluasi SAKIP Satpol PP secara bertahap, yang mana untuk kepentingan tersebut didukung dengan 1 program dan 4 Kegiatan dengan 30 Sub Kegiatan yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.1. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Penyusunan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
- Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan
- Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran
- Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

1.3. Kegiatan Administrasi Umum

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Makanan dan Minuman
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
- Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
- Pengadaan Mebeleur
- Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional
- Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Gedung Kantor

1.4. Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

- Pendidikan dan Pelatihan Formal

Sasaran 2 : Meningkatnya Kondusifitas Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu

Capaian kinerja sasaran diarahkan pada upaya meningkatkan persentase penegakan perda dan perkara secara bertahap, yang mana untuk kepentingan tersebut didukung dengan 1 program dan 3 kegiatan dengan 12 Sub Kegiatan yaitu

1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

1.1. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota

- Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada
- Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota
- Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
- Pembinaan Jabatan Fungsional Satpol Polisi Pamongpraja
- Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum

1.2. Kegiatan Penegakan Perda Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota

- Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota
- Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota
- Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota

1.3. Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota

- Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

Tabel 3. 2 Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Target Capaian Kinerja Renja Tahun 2021

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	2020	Satuan	2021		2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
					Target		Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3		5	9		11	12	13	14	19	
Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik	Meningkatnya Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP			Predikat SAKIP	B		BB		BB		Sub Bagian Program	
				Predikat SAKIP	B		BB		BB			
		01	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Daerah	95%	%	95%	4.928.809.835	95%	5.175.250.327		Sekretariat
		2.0 1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95%	%	95%	10.903.700	95%	11.448.885		Sub Bagian Program
		02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen yang dikerjakan	2	Dok.	4	6.753.700	4	7.091.385		Sub Bagian Program
		05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Evaluasi	0	Krg.	4	4.150.000	4	4.357.500		Sub Bagian Program
		2.0 2	Administrasi Keuangan	Persentase Administrasi Keuangan	0	%	95%	1.567.600.000	95%	1.645.980.000		Sekretariat
		01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Aparatur yang menerima Gaji dan Tunjangan	1.294	OB	1.512	1.497.600.000	1.512	1.572.480.000		Sub Bagian Keuangan
		02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0	%	95%	10.000.000	95%	10.500.000		Sub Bagian Umum & Aparatur
		03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	0	%	95%	10.000.000	95%	10.500.000		Sub Bagian Keuangan
		04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Persentase Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	0	%	95%	10.000.000	95%	10.500.000		Sub Bagian Keuangan
		05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase Penyiapan Bahan Tanggapan	0	%	95%	10.000.000	95%	10.500.000		Sub Bagian Keuangan
		07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	0	Dok.	2	10.000.000	2	10.500.000		Sub Bagian Keuangan
		08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	0	Dok.	2	10.000.000	2	10.500.000		Sub Bagian Keuangan
		09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan OPD	0	Dok.	1	10.000.000	1	10.500.000		Sub Bagian Keuangan
		2.0 3	Administrasi Umum	Persentase Administrasi Umum	95%	%	95%	2.163.035.135	95%	2.271.186.892		Sekretariat
		01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai dan Peranko yang dibeli	1.050	Lbr	1.050	4.625.000	1.050	4.856.250		Sub Bagian Umum & Aparatur
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Telepon, Air dan Listrik	12	Bln	12	71.320.000	12	74.886.000	Sub Bagian Umum & Aparatur	
				Pembayaran Tv Kabel dan Internet	12	Bln	12		12			
				Jumlah Website yang di kelola/dikembangkan	1	Web	1		1		Sub Bagian Program	
06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang dibayar Pajaknya	6	Unit	8	7.800.000	8	8.190.000		Sub Bagian Umum & Aparatur		
07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan	232	OB	238	102.980.000	238	108.129.000		Sub Bagian Keuangan		
09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Peralatan Kerja yang Diperbaiki	27	Unit	47	21.900.000	47	22.995.000		Sub Bagian Umum & Aparatur		
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Dibeli	74	Jenis	74	87.201.500	74	91.561.575		Sub Bagian Umum & Aparatur		
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dokumen yang dicetak	4	Dok.	4	17.404.800	4	18.275.040	Sub Bagian Umum & Aparatur			
		Dokumen yang digandakan	11	Dok.	11		11					
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Alat-Alat Listrik dan Lampu Penerangan Kantor	11	Jenis	11	23.305.000	11	24.470.250		Sub Bagian Umum & Aparatur		

		Bangunan Kantor										
	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang Disediakan	6	Unit	6	46.145.000	6	48.452.250	Sub Bagian Umum & Aparatur		
	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	6	Unit	6	15.050.000	6	15.802.500	Sub Bagian Umum & Aparatur		
	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Langganan Koran	5	Editor	5	8.400.000	5	8.820.000	Sub Bagian Umum & Aparatur		
	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0	Unit	5	5.000.000	5	5.250.000	Sub Bagian Umum & Aparatur		
	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Orang yang Disediakan Makanan dan Minumannya	88	Orang	88	199.060.000	88	209.013.000	Sub Bagian Umum & Aparatur		
	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi	7	Keg.	6	569.223.800	6	597.684.990	Sub Bagian Umum & Aparatur		
Jumlah Peserta Apel Tingkat Provinsi			28	Org	17	17						
Jumlah Peserta Apel Tingkat Nasional			6	Org	5	5						
	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas	2	Unit	3	546.100.000	3	573.405.000	Sub Bagian Umum & Aparatur		
	25	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Pengadaan Mebeleur	1	Unit	10	20.150.000	10	21.157.500	Sub Bagian Umum & Aparatur		
	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah BBM	18.050	Liter	18.050	233.770.035	18.050	245.458.537	Sub Bagian Keuangan		
Jumlah Penggantian Suku Cadang Kendaraan			46	Jenis	46	46						
Jumlah Kegiatan Servis Kendaraan			25	Keg.	25	25						
	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang direhabilitasi	0	Gedung/Rumah	1	183.600.000	1	192.780.000	Sub Bagian Umum & Aparatur		
	2.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	95%	%	95%	1.187.271.000	95%	1.246.634.550	Sekretariat & Bid. PKP		
	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	0	Stel	176	400.200.000	176	420.210.000	Sub Bagian Umum & Aparatur		
	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	0	Orang	59	787.071.000	59	826.424.550	Seksi Peningkatan Kapasitas Personil Satpol PP		
Mantapnya Ketertarikan dan Ketertiban yang Mengarah Kepada Kondisi yang Aman dan Kondusif			Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketertarikan dan Keindahan)	100%		100%		100%		Bidang Pengawasan dan Operasi		
		Meningkatnya Kondusifitas Ketertarikan dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu	Persentase Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah	100%		100%		100%				
			Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketertarikan dan Keindahan)	100%		100%		100%				
			Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Pengawasan Hukum Perda dan Perkada	0%		100%		100%				
		02	Peningkatan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Persentase Tindak Lanjut Pengawasan Pelanggaran Perda/ Perkada/ K3	100%	%	100%	3.060.982.000	100%		3.214.031.100	Bidang Pengawasan dan Operasi
		2.01	Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3	100%	%	100%	2.878.205.000	100%		3.022.115.250	Bidang Pengawasan dan Operasi
		01	Pencegahan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Pengawasan PKL	0	Keg.	3	1.500.431.000	3		1.575.452.550	Seksi Pengendalian Operasi
Jumlah Kegiatan Pengamanan	27			Keg.	25	25						
Jumlah Pegawai Honorer/ Tidak Tetap yang menerima Honorarium	372			OB	372	372						

		Jumlah Kegiatan Pengamanan Pengawasan Pejabat Pemda, Provinsi dan Pusat	24	Org	12		12		
		Jumlah Daerah Rawan Trantibum	0	Org	23		23		
		Jumlah Personil Pengamanan (Pos Penjagaan, Dan Pos, Perwira Pengawas, Pamkat VIP dan PTI)	804	OB	804		804		
02	Penindakan atas Gangguan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada	Jumlah Pelanggaran K3 yang terselesaikan	100%	%	100%	103.789.000	100%	108.978.450	Seksi Penegakan dan Penyelidikan
		Jumlah Pelanggaran K3 keseluruhan/ yang dilaporkan							
		Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	0	Org	20		20		
03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Kunjungan Kerja	42	Keg	23	431.710.000	23	453.295.500	Sub Bagian Umum & Aparatur
		Jumlah Peserta Rakor Tingkat Kabupaten	0	Org	175		175		
04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketertiban dan Ketertiban Umum	Rasio Petugas LINMAS	0,97	Linmas/ RT	0,98	206.945.000	0,98	217.292.250	Seksi Linmas
		Persentase Penanganan bencana	25%	%	50%		50%		
		Jumlah Peserta Pembinaan Potensi Linmas Desa	0	Org	75		75		
05	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimtek Dasar Pol PP	0	Org	75	322.240.000	75	338.352.000	Seksi Peningkatan Kapasitas Personil Satpol PP
		Jumlah Aparatur yang Mengikuti Latihan Bela Diri dan Kesamaptaan	50	Org	50		50		
		Jumlah Peserta Pelatihan Dalmas	50	Org	45		45		
		Jumlah Anggota Satpol PP Kecamatan yang Mengikuti Kegiatan Penyuluhan	0	Org	20		20		
		Jumlah Anggota yang mengikuti Pelatihan Linmas	25	Org	412		412		
06	Pembinaan Jabatan Fungsional Satpol Polisi Pamongpraja	Persentase Jabatan Fungsional Satpol PP	91%	%	95%	79.490.000	100%	83.464.500	Seksi Peningkatan Kapasitas Personil Satpol PP
07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertiban dan Ketertiban Umum	Jumlah MoU	0	MoU	1	50.000.000	1	52.500.000	Seksi Pengendalian Operasi
08	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketertiban dan Ketertiban Umum	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana	0	Unit	1	183.600.000	1	192.780.000	Sub Bagian Umum & Aparatur
2.02	Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran Perda dan Perkada	100%	%	100%	132.777.000	100%	139.415.850	Bid. Penegakan dan Operasi
01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Peserta Sosialisasi Penegakan Perda dan Perkada	85	Org	85	30.546.000	85	32.073.300	Seksi Penegakan dan Penyelidikan
02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Pelanggaran Perda yang Termonitor dan Terevaluasi	0	Kasus	5	52.231.000	5	54.842.550	Seksi Pengendalian Operasi
03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase Penanganan Pelanggaran Perda dan Perkada	100%	%	100%	50.000.000	100%	52.500.000	Seksi Pengendalian Operasi

	2.0 3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan PPNS	0	%	90%	50.000.000	95%	52.500.000	Bid. Penegakan dan Operasi
	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah PPNS yang direkrut	0	Org	2	50.000.000	2	52.500.000	Seksi Penegakan dan Penyelidikan
					TOTAL		7.989.791.835		8.389.281.427	



BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan keamanan, Ketertiban dan ketentraman serta perlindungan masyarakat sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru mengenai keamanan, ketertiban dan ketentraman serta perlindungan masyarakat

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu merupakan dokumen resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya

Demikian Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 ini dibuat untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan 1 (satu) Tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu.

Putussibau, Juli 2020

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU,**


RUPINUS, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19691112 199010 1 001

Tabel 4. 1 Link/ URL Download RENJA dan Dokumen SAKIP

No	Dokumen	Link/ Alamat Web/ Url	Password		Ket
			Proteksi	Download	
1	Renstra 2016-2021	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/renstra-rencana-strategis/			
2	Renja	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/renja-rencan-kerja/			
3	IKU	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/indikator-kinerja-utama/			
4	IKI	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/iki-indikator-kinerja-individu/			
5	Peta Proses Bisnis	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/peta-proses-bisnis/			
6	Cascading	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/cascading/			
7	Perjanjian Kinerja	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/indikator-kinerja-utama/perjanjian-kinerja/			
8	Rencana Aksi Kinerja	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/rencana-aksi-kinerja/			
9	Monitoring Kinerja	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/monitoring-rencana-aksi-atas-kinerja/			
10	Evaluasi Kinerja	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/evaluasi-kinerja/			
11	Laporan Kinerja	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/lakip/			
12	LPPD	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/lppd/			
13	Laporan Aset	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/laporan-aset/			